



## **EVALUASI PROGRAM BANTUAN PANGAN NON TUNAI DI KECAMATAN TELAGASARI KABUPATEN KARAWANG**

**Nurul Alfenia, Rudyk Nababan, Sopyan Resmana Adiarsa**

Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,

Universitas Singaperbangsa

### **Abstrak**

Guna mengatasi kemiskinan, Pemerintah telah menerbitkan berbagai kebijakan serta program untuk mengatasi permasalahan kemiskinan, salah satunya yakni Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai. Bantuan Pangan Non Tunai yang selanjutnya disingkat BPNT ialah bantuan sosial yang penyalurannya dilakukan setiap bulan secara nontunai dari pemerintah kepada KPM berupa uang elektronik guna membeli bahan pangan yang telah e-warong tentukan. Program BPNT sudah dilaksanakan di seluruh kecamatan Kabupaten Karawang sejak tahun 2018 termasuk Kecamatan Telagasari yang menjadi lokus penelitian ini. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan mendeskripsikan tetang kejadian yang ada di lingkungan sosial. Pada Penelitian ini menggunakan teori evaluasi program menurut Wirawan yang terdiri dari aspek (1) masukan (input); (2) proses (process); manfaat (outcomes); dan akibat (impact). Berdasarkan fakta di lapangan menunjukkan bahwa program BPNT di Kecamatan Telagasari Kabupaten Karawang belum berjalan dengan baik, dikarenakan SDM yang tersedia belum memadai, proses penyaluran dan pemanfaatan dana belum terlaksana dengan baik, KPM BPNT belum menerima bantuan sesuai dengan haknya, serta masih belum tepatnya sasaran penerima BPNT.

**Kata Kunci:** Bantuan Pangan Non Tunai, Evaluasi, Program.

### **PENDAHULUAN**

Kemiskinan merupakan salah satu permasalahan paling besar yang

dihadapi oleh setiap Negara. Badan Pusat Statistik (BPS) dalam Yoserizal (2015), menguraikan bahwa kemiskinan

diartikan sebagai suatu keadaan di mana seseorang atau rumah tangga mengalami kekurangan dalam memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupannya. Muttaqien dalam Rosaliana dan Hardjati (2019), menerangkan bahwa secara umum dampak yang akan timbul dari pemasalahan kemiskinan yakni hilangnya kesejahteraan bagi kalangan miskin di mana tidak terpenuhinya kebutuhan dasar. Di Indonesia, laporan Bank Dunia menguraikan bahwa lebih dari sepertiga rumah tangga diindikasikan kekurangan makan. Adapun seperempat rumah tangga lainnya menunjukkan kekurangan pangan. Hal ini mengindikasikan bahwa pangan menjadi masalah serius yang bersamaan dengan kemiskinan, (Pusparisa, 2020). Pemerintah mengupayakan pemberian bantuan sosial untuk mengentaskan masyarakat fakir miskin dari kemiskinan yang dapat mengurangi beban kebutuhannya dan penyalurannya kepada masyarakat penerima manfaat, harus dilaksanakan secara efisien guna dapat diterima tepat sasaran, tepat waktu, tepat jumlah, tepat kualitas, serta tepat administrasi. Dengan pertimbangan ini, telah diterbitkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai.

Dengan fasilitas serta akses yang layak, pada tahun 2017 penyaluran BPNT mulai dilaksanakan, dengan sasaran di sejumlah 44 kota di seluruh Indonesia. BPNT secara bertahap, sesuai dengan kesiapan sarana dan prasarana penyalurannya diperluas ke seluruh kota serta kabupaten. Subsidi Rastra pun dialihkan, sehingga distribusi bantuan sosial disalurkan dalam bentuk non tunai di kabupaten dan kota, walaupun hanya sebagian daerah yang sudah menjadi penyalur BPNT sementara terdapat di beberapa daerah masih melakukan pendistribusian Rastra tanpa harga tebus yang harus dibayarkan keluarga

penerima manfaat, (Fadlurrohik dkk, 2019:128).

Guna terciptanya pendistribusian bantuan sosial pangan yang lebih efektif, tepat sasaran, serta mendorong keuangan inklusif, mekanismenya telah diuraikan dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Nontunai yang disebut (BPNT). BPNT ialah bantuan sosial yang disalurkan secara nontunai dari Pemerintah kepada Keluarga Penerima Manfaat yang selanjutnya disingkat KPM yang merupakan keluarga yang ditetapkan sebagai penerima Bantuan Sosial. KPM menerima bantuan sosial melalui uang elektronik pada setiap bulan yang selanjutnya diperlukan untuk membeli bahan pangan yang telah ditentukan *e-warong*, (Pedoman Umum Program Sembako Tahun 2020).

Adapun arahan Pemerintah terkait proses pemberian BPNT kepada KPM dalam mengentaskan kemiskinan, Dinas Sosial Kabupaten Karawang telah melakukan penyaluran urusan Pemerintah Daerah dalam bidang sosial sejak berlakunya Program BPNT pada tahun 2018. Adapun jumlah KPM BPNT di Kabupaten Karawang tahun 2019 sampai dengan tahun 2021, disajikan dalam tabel 1.1 berikut:

**Tabel 1.1 Jumlah KPM BPNT di Kabupaten Karawang, Tahun 2019-2021**

Wilayah Kabupaten Sendiri	Jumlah (KK)		
	2019	2020	2021
Kabupaten Karawang	141.846	157.816	154.714

Sumber :Dinas Sosial Kabupaten Karawang, 2021

Dari tabel 1.1 di atas dapat dijelaskan bahwa jumlah penerima BPNT di Kabupaten Karawang pada tahun 2019 sebanyak 141.846 KK dan pada tahun 2020 mengalami peningkatan

yakni mencapai 157.816 KK. Kemudian, pada tahun 2021 mengalami sedikit penurunan yakni sejumlah 154.714 KK, penurunan tersebut terjadi karena adanya pemadanan data NIK. Selain itu, pembersihan data NIK tersebut ditujukan untuk mendapatkan data penerima BPNT yang valid dan terdaftar dalam Kementerian Dalam Negeri.

Kecamatan Telagasari ialah salah satu kecamatan di Kabupaten Karawang yang masuk ke dalam kategori miskin. Kecamatan Telagasari memiliki luas wilayah terluas kedua di Kabupaten Karawang setelah Kecamatan Karawang Barat serta merupakan kecamatan dengan jumlah desa terbanyak ketiga setelah Kecamatan Jatisari dan Kecamatan Tempuran, yakni terdapat sebanyak 14 desa, dengan jumlah penduduk sebanyak 68.911 jiwa.

Menurut data Dinas Sosial Kabupaten Karawang pada tahun 2021, Kecamatan Telagasari yakni salah satu kecamatan di lingkungan Kabupaten Karawang yang menjadi sasaran program BPNT. Berdasarkan pendataan pada bulan Desember tahun 2021 terdapat sebanyak 3.427 penerima BPNT yang tersebar di 14 (empat belas) desa di Kecamatan Telagasari, tertera dalam tabel 1.2 berikut:

**Tabel 1.2 Jumlah KPM BPNT Di Kecamatan Telagasari, Desember 2021**

	<b>Nama Desa</b>	<b>Jumlah (KK)</b>
1	Cadaskertajaya	194
2	Cariumulya	232
3	Cilewo	406
4	Ciwulan	213
5	Kalibuaya	280
6	Kalijaya	292
7	Kalisari	338
8	Linggarsari	183
9	Pasirkamuning	273
10	Pasirmukti	223
11	Pasirtalaga	221
12	Pulosari	231
13	Talagamulya	219
14	Telagasari	122
	<b>Total</b>	<b>3.427</b>

*Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Karawang, 2021.*

Dari tabel 1.2 di atas dapat dijelaskan bahwa desa terbanyak penerima BPNT yaitu Desa Cilewo dengan jumlah penerima sebanyak 406 KK. serta desa yang menerima BPNT paling sedikit berada di Desa Talagasari dengan jumlah penerima yakni 122 KK.

Awal penyaluran awal BPNT di Kabupaten Karawang pada tahun 2018 hingga 2019, disalurkan oleh Bank Negara Indonesia (BNI) kepada setiap KPM dengan jumlah dana sebesar Rp110.000,- dicairkan satu bulan sekali. Kemudian pada awal tahun 2020, jumlah dana yang dicairkan meningkat menjadi sebesar Rp150.000,- dan di masa pandemi *covid-19* yakni bulan Maret 2020 terdapat kenaikan nominal menjadi sebesar Rp200.000,- dan disalurkan oleh Bank Penyalur melalui Bank Tabungan Negara (BTN). Pada tahun 2020 penyaluran yang dilakukan oleh BTN, terdapat inkonsistensi pencairan dana BPNT, adanya migrasi atau perpindahan dari Bank BNI ke Bank BTN dalam program BPNT membuat gaduh masyarakat penerima bantuan atau KPM. Pada tahun 2022 pendamping sosial BPNT yang sebelumnya ada namun ditiadakan, serta PSM di mana pada satu desa terdapat tiga orang namun yang aktif hanya satu orang saja. Tujuan awal diadakannya BPNT ini untuk meningkatkan ketahanan pangan dan nutrisi bagi masyarakat, sedangkan pada awal tahun 2022 pemerintah mengalokasikan BPNT dalam bentuk uang tunai. Penyaluran BPNT menjadi uang tunai menimbulkan permasalahan baru sebab uang tersebut yang seharusnya digunakan untuk membeli kebutuhan pangan, namun terdapat KPM yang membeli kebutuhan di luar pangan.

Permasalahan lain adalah masih adanya KKS yang dimiliki oleh KPM namun dipegang oleh pihak lain sehingga belum berdasarkan aturan dalam Program Sembako 2020. Hal ini

mengindikasikan kurangnya pengawasan dan pemahaman dari berbagai pihak terkait. Selain itu, permasalahan lain yang menjadi sorotan masyarakat dalam penyaluran dana BPNT kepada KPM, yaitu periode pencairan tidak konsisten dengan jadwal pencairan yang sudah ditetapkan dan pemberitahuannya secara mendadak dan tidak merata serta pada saat penyaluran BPNT, KPM belum menerima dengan seutuhnya, sehingga manfaat dana BPNT selama ini dinilai masih belum sepenuhnya dirasakan oleh KPM.

Guna diperolehnya hasil dari suatu program, evaluasi merupakan hal yang penting untuk dilaksanakan mengingat tidak semua program dapat mencapai hasil yang diinginkan. menurut Wirawan, (2016) mengungkapkan bahwa evaluasi program merupakan metode yang sistematis untuk mengumpulkan, menganalisis, dan memakai informasi untuk menjawab pertanyaan dasar. Wirawan mengelompokkan indikator evaluasi program terdiri dari 4 bagian yakni masukan (*input*), proses (*process*), manfaat (*outcome*), dan akibat (*impact*).

## METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Cresswell, (2013:4) penelitian kualitatif ialah metode-metode guna mendalami dan memahami makna oleh sejumlah individu atau sekelompok orang yang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan sumber data primer serta sumber data sekunder (Wekke:2019). Data primer merupakan data-data yang diperoleh oleh peneliti secara langsung dari lapangan atau tempat penelitian, dan sumber data sekunder yang digunakan merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung atau berupa dokumen yang telah ada sebelumnya sebagai

pendukung dari data primer, terkait dengan tinjauan evaluasi program serta BPNT. Teknik penentuan informan dalam penelitian yang akan dilakukan oleh Peneliti menggunakan teknik *purposive sampling* yang merupakan teknik penentuan sumber data dengan mempertimbangkan orang yang diperkirakan paling paham mengenai data maupun keterangan yang peneliti butuhkan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu studi pustaka, studi lapangan, dan dokumentasi. Menurut Sugiyono (2020), analisis data didefinisikan sebagai proses mencari serta menyusun secara sistematis data yang didapat dari wawancara, catatan lapangan serta dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting, kemudian membuat kesimpulan sehingga dapat dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Adapun Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan/verifikasi, dan keabsahan data.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada penelitian ini menggunakan teori evaluasi menurut Wirawan, (2016:25) mengungkapkan bahwa evaluasi program merupakan metode yang sistematis untuk mengumpulkan, menganalisis, dan memakai informasi untuk menjawab pertanyaan dasar. Wirawan mengelompokkan indikator evaluasi program terdiri dari 4 bagian yakni masukan (*input*), proses (*process*), manfaat (*outcome*), dan akibat (*impact*).

### 1) Masukan (*Input*)

Pada aspek ini lebih berfokus untuk mengevaluasi apakah sumber-sumber yang diperlukan untuk melaksanakan suatu program yakni *man, money, material, technology, method* tersedia kualitas dan kuantitasnya. *Man*

atau sumber daya manusia pelaksanaan program BPNT di Kabupaten Karawang melibatkan beberapa pihak yakni Sekretaris Daerah, Dinas Sosial, Sekretaris Camat, TKSK, serta PSM setempat. Aspek SDM masih belum memadai dalam hal ini kurangnya pendamping dan PSM setempat. Di mana pendamping di Kecamatan Telagasari hanya terdapat 1 (satu) orang yakni TKSK serta PSM yang seharusnya di satu desa terdapat 3 (tiga) orang namun yang aktif hanya 1 (satu) orang saja karena PSM ada kesibukan yang lain sehingga kurang fokus dalam melaksanakan pendistribusian BPNT di Kecamatan Telagasari. Selain itu, SDM pelaksana lainnya yakni pengelola *e-warong* belum sesuai dengan Pedoman Program Sembako 2020, meskipun pihak *e-warong* telah mengupayakan masyarakat yang lain untuk menjadi *e-warong* namun karena tidak siapnya masyarakat tersebut, sehingga dikelola oleh pihak yang tidak berdasarkan pada standar Pedoman Umum Program Sembako 2020. Pada aspek *money*, anggaran dana BPNT berasal dari APBN, yang oleh Kementerian Sosial melakukan penyaluran dana tersebut melalui bank penyalur. Berdasarkan pedoman umum BPNT 2020 yang disusun oleh kementerian/lembaga sektor terkait, pendistribusian BPNT dijadwalkan pada tanggal 10 setiap bulan ke rekening KPM, namun pada kenyataannya pencairan dana bisa menghabiskan waktu yang lebih lama pada saat pendistribusian BPNT yang dilakukan oleh pihak bank yang bekerja sama dengan Kemensos. Dalam *materials* atau dalam hal ini bahan-bahan yang diperlukan pada pelaksanaan program BPNT yakni bahan pangan yang dapat dibeli di *e-warong* oleh KPM seperti yang tercantum dalam Pedoman Umum Program Sembako 2020. Dalam Pedoman Umum Program Sembako 2020, *e-warong* di Kecamatan Telagasari dapat menyediakan bahan pangan seperti beras, telur, ayam, dan

bahan pangan lain yang mengandung karbohidrat, protein hewani, protein nabati, vitamin dan mineral yang dibutuhkan oleh KPM, dengan demikian, KPM dapat terpenuhi kebutuhan pangan yang diharapkan dapat memberikan gizi serta nutrisi yang seimbang serta meningkatkan ketahanan pangan bagi KPM. Kemudian pada teknologi, program BPNT sangat bertumpu pada alat pendukung penyaluran bantuan seperti KKS sebagai media penyaluran bantuan dari Kemensos ke KPM dan teknologi mesin *Electronic Data Capture (EDC)* yang digunakan KPM sebagai alat gesek tunai pembayaran. Namun dalam pelaksanaannya, mesin *EDC* yang tersedia di salah satu *e-warong* Kecamatan Telagasari sering mengalami gangguan, sehingga mengganggu proses transaksi pembelian bahan pangan yang dilakukan oleh KPM. Dalam hal ini, pihak *e-warong* dan Bank Penyalur kurang memaksimalkan perbaikan dalam fasilitas penunjang program BPNT tersebut. Selanjutnya, pada *method* yakni mekanisme pelaksanaan BPNT dilakukan dengan baik secara berjenjang melalui berbagai tahapan mulai dari persiapan, edukasi sosialisasi, registrasi, distribusi KKS, penyaluran dana serta pemanfaatan dana kepada KPM. Dalam pelaksanaannya terdapat surat pemberitahuan dari Dinsos yang kemudian menginstruksikan ke desa-desa, seperti adanya perubahan kebijakan penyaluran melalui KKS yang kemudian menjadi tunai.

## 2) Proses (*Process*)

Pada tahap penentuan KPM menunjukkan masih terdapat hambatan terkait pendataan yang dilakukan sehingga KPM yang menerima belum sepenuhnya tepat sasaran. Penerima BPNT harus terdaftar dalam DTKS yang penjangkangan/pendataannya dari tingkat Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten, kemudian diteruskan ke Kemensos. Namun, masih terjadi kurangnya

pengawasan langsung ke lapangan dan kurangnya koordinasi dari pihak-pihak terkait dalam penanganan pendataan tersebut. Lebih lanjut terkait sering terjadinya kendala di lapangan ketika KPM melakukan transaksi pembelian bahan pangan menggunakan KKS yang digesek melalui mesin *EDC* sering *error*. Hal ini menandakan bahwa peran dari Bank Penyalur dan pihak *e-warong* yang ada di Kecamatan Telagasari masih kurang optimal. Proses pemanfaatan dana yang lainnya terkait kurangnya sosialisasi pada tahap ini yakni bantuan yang seharusnya dibelanjakan hanya untuk membeli bahan pangan justru dibelikan keperluan lain. Meskipun sudah ada himbauan untuk dana tersebut dibelikan bahan pangan, namun kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat agar dana tersebut sepenuhnya digunakan untuk membeli bahan pangan.

### 3) Manfaat (*Outcomes*)

Program BPNT di Kecamatan Telagasari dilihat dari *outcome* (manfaat) dapat dirasakan oleh KPM di mana respon terkait adanya program tersebut sangat senang dan terbantu secara ekonomi. Hal ini dapat dilihat dari persepsi atau respon dari KPM dalam menanggapi mengenai manfaat program BPNT yang mengungkapkan bahwa dengan adanya program BPNT, KPM merasa terbantu dalam hal pembelian bahan pangan karena setiap KPM menerima bantuan sebesar Rp200.000 untuk dibelanjakan di *e-warong*. Namun kendala ketika penyaluran BPNT yang dilakukan secara tunai ditemukan adanya dana yang diterima tidak utuh. Dalam hal ini, pelaksana yakni pendamping BPNT kurang memantau jalannya program BPNT yang disalurkan kepada KPM agar sesuai dengan hak-hak KPM, sehingga mekanisme pelaksanaan program dapat berjalan dengan baik sebagaimana mestinya. Selain itu, kurangnya pemahaman dari pelaksana

serta KPM mengenai jalannya BPNT. Meskipun penyaluran saat ini kembali ke KKS, namun hal ini menjadi evaluasi jika kebijakan tunai nanti diterapkan kembali.

### 4) Akibat (*Impact*)

Dalam pelaksanaan program BPNT di Kecamatan Telagasari dilihat dari *impact* (akibat) dari adanya program BPNT ini dapat mensejahterakan masyarakat kurang mampu. Adanya beberapa KPM yang sudah mampu dan keluar dari program tersebut menandai program BPNT ini berpengaruh dalam penanggulangan kemiskinan di Kecamatan Telagasari. Selain itu, masyarakat merasakan perubahan sebelum dan sesudah adanya program BPNT, hal tersebut dapat dilihat dari persepsi beberapa informan yang mengungkapkan bahwa setelah adanya program ini masyarakat merasakan lebih praktis dengan menggunakan kartu sembako tersebut hadirnya program BPNT memberikan jenis bahan pangan yang lebih beragam dibandingkan sebelumnya hanya beras saja dari program Rastra. Namun masih terdapat permasalahan dalam data perubahan KPM, meskipun ada beberapa masyarakat yang sudah keluar dari program ini, namun masih belum tepat 100% tepat sasaran. Dikarenakan kurangnya pemantauan langsung kepada penerima, juga kurangnya kesadaran masyarakat yang sudah tidak layak mendapatkan bantuan tetapi masih ingin mendapatkan bantuan.

### SIMPULAN

Berdasarkan kepada hasil penelitian serta pembahasan yang telah dijabarkan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan Evaluasi Program Bantuan Pangan Non Tunai di Kecamatan Telagasari Kabupaten Karawang sebagai berikut:

*Input* (masukan) dalam pelaksanaan program BPNT di

Kecamatan Telagasari Kabupaten Karawang secara kuantitas belum memadai, hal tersebut terlihat dari kurangnya pendamping di mana hanya ada satu pendamping yakni TKSK. Selain itu, PSM yang seharusnya terdapat 3 (tiga) orang per 1 (satu) desa, namun dalam pelaksanaannya di lapangan yang aktif hanya 1 (satu) orang saja sehingga hal ini menyebabkan adanya KPM yang masih belum paham mengenai mekanisme BPNT. Selain itu, pengelola *e-warong* masih belum berdasarkan pada Pedoman Umum Program Sembako 2020.

Proses dalam pelaksanaan program BPNT belum berjalan baik, karena masih ditemukan keterlambatan dalam melaksanakan pendistribusian BPNT di Kecamatan Telagasari. Kurangnya pemantauan dari Bank Penyalur yang ada di Kecamatan Telagasari masih kurang bertanggungjawab ketika terjadi kendala-kendala di lapangan seperti KKS mengalami gangguan dan mesin *EDC* sering *error*, pendamping pun masih kurang respons terhadap permasalahan yang terjadi di lapangan. Kurangnya sosialisasi secara masif pada tahap pemanfaatan sehingga adanya penyalahgunaan bantuan. Bantuan yang seharusnya dibelanjakan hanya untuk membeli bahan pangan justru dibelikan keperluan lain.

Manfaat dalam program BPNT sudah dapat dirasakan oleh KPM terutama memenuhi kebutuhan dan mengurangi beban pengeluaran dalam pemenuhan kebutuhan pangan. Namun dana yang disalurkan belum dirasa baik oleh KPM. Kurangnya koordinasi dan pengawasan sehingga rentan untuk terjadi penyimpangan dalam penyaluran pendistribusian BPNT di Kecamatan Telagasari.

Akibat dari program BPNT perubahan data masih belum dilakukan secara maksimal yang menyebabkan masyarakat yang berhak mendapatkan

bantuan tidak mendapatkan bantuan, juga kurangnya pemantauan langsung kepada penerima, serta kurangnya kesadaran masyarakat yang sudah tidak layak mendapatkan bantuan tetapi masih ingin mendapatkan bantuan.

## DAFTAR PUSTAKA

Fadlurrohimi, Ishak Nulhaqim, S. A., & Sulastri, S. (2019). *Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (Studi Kasus di Kota Cimahi)*. *Social WorkJournal*, 9(2), 124. DOI:<https://doi.org/10.24198/share.v9i2.20326>

Rosaliana, A., & Hardjati, S. (2019). *Efektivitas Pelaksanaan Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya*. *Public Administration Journal*, 2(2), 97. <http://paj.upnjatim.ac.id/index.php/paj/article/view/13/12>

Cresswell, John W. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Wekke, Ismail Suwardi. (2019). *Metode Penelitian Sosial*. Yogyakarta: Gawe Buku.

Wirawan. (2016). *Evaluasi: Teori, Model, Metodologi, Standar, Aplikasi dan Profesi*. Jakarta: Rajawali Pers.

Yoserizal. (2015). *Indeks Kemiskinan Indonesia*. Pekanbaru: Alaf Riau.

Pusparisa. 2020. *Ancaman Kemiskinan dan Kerawanan Pangan saat Pandemi Covid-19*. Diunduh di <https://katadata.co.id/muhammadridhoi/analisis-sdata/5f76a6e7a1930/ancaman-kemiskinan-dan-kerawanan-pangan-saat-pandemi-covid-19/> tanggal Jum'at 4 Maret 2022

Samosir, Lassarus. 2021. *Warung Kepala Desa Diduga Dijadikan e-warong*. Diunduh di <https://spiritnews.co.id/2021/12/29/warung-kepala-desa-dan-posyandu-di-telagasari-diduga-dijadikan-e-warong/> tanggal 22 Mei 2022.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai, (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 156).

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1497).

Pedoman Umum Program Sembako 2020, disusun oleh Kementerian Koordinator Bidang 2Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Kementerian Sosial, Kementerian Dalam Negeri, Kantor Staf Presiden, Sekretariat TNP2K, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dan bank penyalur anggota Himbara.